

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) merupakan sebuah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala negara dan utusan perwakilan 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi pembangunan milenium berupaya memenuhi hak-hak dasar manusia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia berupa delapan tujuan dan 18 target (Shofiyya, 2013). MDGs mulai dijalankan sejak September tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 dan menjadi sebuah paradigma pembangunan hampir seluruh negara di dunia. Negara-negara serta berbagai pihak terus memantau pelaksanaan, pencapaian, dan evaluasi agenda MDGs melalui berbagai indikator. Hal tersebut menunjukkan komitmen masyarakat global terhadap implementasi tujuan-tujuan MDGs.

Memperhatikan pasca perubahan dari pelaksanaan MDGs, berbagai negara telah merumuskan platform pembangunan dunia yang baru sebuntuk melanjutkan keberlangsungan MDGs. Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut agenda MDGs diharapkan lebih berorientasi pada keadilan baik untuk generasi saat ini maupun sebagai warisan produktif untuk generasi selanjutnya. Harapan tersebut sebagai interpretasi dari fenomena pelaksanaan MDGs berikut hasil capaiannya tidak merata di beberapa negara, terutama negara yang kurang memiliki stabilitas dan fasilitas yang memadai.

Pada sidang umum PBB ke-70 di New York, Amerika Serikat, bulan September 2015, 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyetujui dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan universal baru. SDGs memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target, yang pelaksanaannya mulai diterapkan pada tahun 2016 dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030 (sdg2030indonesia.org, 2016, hal. 4).

Dalam konteks penyempurnaan MDGs, agenda SDGs mempunyai beberapa perbedaan dibandingkan dengan agenda MDGs. Sejak awal, SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, yang termasuk di dalamnya negara maju dan berkembang. Dengan demikian, masing-masing aktor pembangunan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam upaya tercapainya SDGs. Agenda SDGs memuat berbagai isu pembangunan yang lebih komprehensif baik bersifat kualitatif, yaitu memuat isu-isu yang tidak ada dalam agenda MDGs, dan juga secara kuantitatif, dengan rencana aksi yang dilengkapi target penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuannya.

Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal, SDGs dapat diterapkan baik di tingkat global, regional, dan nasional. Namun demikian dalam pelaksanaan SDGs hendaknya dilakukan secara sistematis dan konsisten mengusung semangat dan nilai-nilai SDGs yang partisipatif dan inklusif seperti yang telah dibangun dalam SDGs di tingkat global. Para pemangku kepentingan di negara-negara yang telah menyetujui konsep pembangunan

berkelanjutan ini melakukan percepatan implementasi tujuan dan target SDGs di berbagai sektor pembangunan.

Dalam dokumen SDGs telah memuat dan menjelaskan bahwa selain peran pemerintah terdapat peran strategis lainnya guna mengimplementasikan berbagai upaya pencapaian tujuan, salah satunya adalah peran parlemen.

“We acknowledge also the essential role of national parliaments through their enactment of legislation and adoption of budgets and their role in ensuring accountability for the effective implementation of our commitments...(paragraph 45)” (sustainabledevelopment.un.org, 2015)

Dengan demikian, parlemen memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memastikan implementasi dan tercapainya berbagai tujuan dan target yang ditetapkan dalam SDGs.

Dalam perkembangan situasi dan kondisi dunia saat ini di mana ketergantungan antara negara semakin kuat, diplomasi menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian kepentingan nasional suatu negara, dan menjadi instrumen komunikasi yang efektif bagi negara-negara guna mengatasi berbagai isu global yang menjadi permasalahan bersama atau berkaitan dengan kepentingan nasional suatu negara, termasuk dalam mewujudkan SDGs.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melalui diplomasi parlemen membangun kemitraan internasional guna menguatkan upaya pencapaian berbagai tujuan SDGs. Dasar keterlibatan DPR RI dalam SDGs adalah fungsi diplomasi parlemen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat 2 Undang-

Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara hubungan luar negeri terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Diplomasi parlemen sebagai *second track diplomacy*, memiliki peran untuk mendukung upaya pemerintah dalam berbagai program diplomasi dengan negara lainnya. Peran diplomasi DPR RI diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) Pasal 69 ayat 2, di mana fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Oleh karena itu muncul gagasan dan rencana tentang pengembangan fungsi DPR RI sebagaimana disampaikan oleh wakil ketua DPR RI bidang KOKESRA periode tahun 2014-2019 bahwa fungsi parlemen akan dikembangkan menjadi lima yaitu terdiri dari legislasi, anggaran, pengawasan, diplomasi dan representasi (kompas.com, 2018). Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari peran individu anggota DPR RI agar tidak bertindak sendiri-sendiri dan/atau melaksanakan kunjungan luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Sebagai upaya implementasi fungsi diplomasi yang dilaksanakan parlemen, dibentuklah Alat Kelengkapan Dewan yaitu Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Pasal 116, pelaksanaan diplomasi parlemen yang dilaksanakan BKSAP DPR RI meliputi kegiatan lintas batas di dunia internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen. BKSAP konsisten berupaya menyuarakan kepentingan nasional

Indonesia dengan mendorong dan memperkuat peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan negara lainnya sebagai bagian dari peran dan fungsi DPR RI dalam melaksanakan *second track diplomacy*. Selain memperkuat dan mendorong peningkatan kerja sama, BKSAP melakukan berbagai kegiatan diantaranya bertukar praktik cerdas dan pengalaman tentang isu-isu internasional yang menjadi perhatian bersama, salah satunya adalah pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Dalam konteks tersebut, BKSAP mendorong dan memastikan komitmen para pemangku kepentingan, termasuk peran negara sahabat dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang memberikan kewenangan DPR RI dalam membentuk undang-undang, DPR RI berperan penting untuk interpretasi hal-hal yang berkaitan dengan SDGs ke dalam berbagai peraturan perundangan guna mendukung pencapaiannya. Kemudian dalam konteks fungsi anggaran, DPR RI menyelaraskan penyusunan anggaran dengan rencana pembangunan berkelanjutan nasional dan berorientasi untuk menyesuaikan dengan keseluruhan point-point yang menjadi tujuan SDGs. Sedangkan dalam konteks fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SDGs, DPR RI memegang peranan penting guna mengevaluasi sebagai upaya untuk memberikan masukan atas kendala atau pencapaian hasil yang belum sesuai dengan tujuan SDGs.

Menguatkan solidaritas global merupakan salah satu tujuan yang tertuang dalam dokumen SDGs 2030. SDGs hanya dapat diwujudkan dengan adanya komitmen yang kuat terhadap kemitraan dan kerja sama global. Belum pernah dunia terhubung lebih baik daripada saat ini dan potensi peningkatan keterhubungannya akan semakin kuat dan mempengaruhi kualitas kemajuan setiap

negara. Memperbaiki akses pada pengetahuan dan implementasi teknologi menjadi bagian penting untuk berbagi ide dan mendorong inovasi. Dibutuhkan kebijakan yang terkoordinasi untuk membantu negara berkembang dalam mengelola keuangan, perekonomian dan termasuk di dalamnya mendorong investasi di negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan dari pembangunan berkelanjutan. Pada tujuan ke-17 ini yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, membidik penguatan kerja sama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan dengan mendukung rencana nasional untuk mencapai tujuannya. Mendorong perdagangan internasional dan membantu negara berkembang untuk meningkatkan ekspornya merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem perdagangan yang berdasarkan kaidah-kaidah universal, terbuka, tepat guna, adil serta bermanfaat bagi semua pihak (sdgs.bappenas.go.id, Tujuan-17).

Peran diplomasi yang baik menghasilkan berbagai komitmen dan peluang yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Hasil diplomasi tersebut harus diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional serta berdasarkan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya, implementasi hasil diplomasi selain akan melibatkan banyak pemangku kepentingan juga akan membutuhkan peran sumber daya keuangan baik dari dalam ataupun dari luar negeri.

Arus keuangan di Indonesia yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam setiap tahun anggaran, hampir setiap tahunnya mengalami defisit. Puncak defisit terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 956.3 T atau mencapai 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (kompas.com, 2021). Kondisi defisit APBN yang selalu terjadi dalam setiap tahunnya mengakibatkan lambatnya pembangunan serta penyelesaian berbagai

masalah dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain memperbaiki kondisi tersebut dengan peningkatan masuknya investasi ke dalam negeri, pemerintah dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya guna memperbaiki posisi neraca perdagangannya.

Kolombia adalah negara sahabat yang penting bagi Indonesia. Kedua negara ini telah memperingati 40 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2020. Momentum tersebut memperkuat kerja sama Indonesia dengan Kolombia dalam berbagai bidang diantaranya investasi dan perdagangan. Banyak peluang kerja sama yang potensial dan dapat dieksplorasi lebih jauh di antara Indonesia dan Kolombia. Kolombia memiliki potensi untuk menjadi pusat produk Indonesia di kawasan Amerika Latin sementara Indonesia dapat menjadi pusat produk Kolombia di wilayah Asia Tenggara (Jannah, 2020).

Berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan Kolombia menjadi salah satu negara penting dalam diplomasi Indonesia dan dapat mendorong implementasi SDGs di Indonesia, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Kemitraan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Parlemen Kolombia dalam Upaya Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kemitraan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di kancah internasional?
2. Bagaimana agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia?

3. Bagaimana kemitraan BKSAP DPR RI dengan Parlemen Kolombia dalam upaya implementasi SDGs di Indonesia?

1.2.1. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, penulis membatasi permasalahan yang diteliti pada tujuan ke-17 yaitu Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*) dari kedua pihak yaitu Indonesia dan Kolombia.

1.2.2. Rumusan Masalah

Untuk membantu dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti berdasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana kemitraan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Parlemen Kolombia dalam upaya mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia untuk mencapai sasaran *partnership for the goals*?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kemitraan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di kancah internasional.

2. Untuk mengetahui agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam kaitanya dengan pembangunan nasional.
3. Untuk mengetahui kemitraan BKSAP DPR RI dengan Parlemen Kolombia dalam upaya implementasi SDGs di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat akademis
 - a. Menambah khasanah ilmu dan pengetahuan dalam pelaksanaan diplomasi parlemen.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi untuk dijadikan bahan referensi bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian serupa.
2. Manfaat praktis
 - a. Membantu sosialisasi peran diplomasi BKSAP DPR RI.
 - b. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan yang memerlukan data tentang kemitraan BKSAP DPR RI dalam upaya implementasi SDGs di Indonesia.
 - c. Menyampaikan saran perbaikan untuk para pihak yang terlibat dalam implementasi SDGs di Indonesia.
 - d. Memperkuat motivasi pentingnya diplomasi guna pencapaian pembangunan berkelanjutan.